



PERTANYAAN & MASUKAN



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI

PANJA MENGENAI PUPUK BERSUBSIDI DAN KARTU TANI

**(Ketersediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Menghadapi
Musim Tanam II 2021)**

Disampaikan oleh : Ir. Endro Hermono, MBA

No Anggota : A - 111

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Kita Untuk Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Salam Indonesia Raya...!

**Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI serta
Deputi II Kemenko Perekonomian RI, Eselon 1 Kementerian
Pertanian RI, Dirut Pupuk Indonesia dan Ketum HIMBARA yang
berbahagia.**

Mewakili Fraksi Partai Gerindra DPR RI, ijin kami menyampaikan ringkasan tanggapan dan pertanyaan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

1. Berkaitan dengan ketersediaan dan penyaluran pupuk subsidi terkhusus dalam menghadapi musim tanam II tahun 2021 maka keberadaan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) sangat

penting mengingat hampir setiap masa tanam terjadi kelangkaan pupuk. Apakah kementan selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja KPPP ini setiap masa tanam atau setahun sekali. Bagaimana pertanggungjawaban KPPP jika terjadi masalah kelangkaan pupuk di daerah dan bagaimana tindakan kementan. Dengan permasalahan kelangkaan tersebut, apa masih penting KPPP ini dipertahankan.

2. Berdasarkan RDP 18/01/2021, Dirjen PSP akan melakukan koordinasi dengan BPSDMP agar peran penyuluh dapat ditingkatkan. Bagaimana bentuk koordinasi Dirjen PSP dan BPSDMP dalam meningkatkan peran dan kinerja dari penyuluh agar lebih efektif? Bagaimana dengan dana operasional penyuluh yang tidak sebanding dengan kinerja mereka yang dimana satu penyuluh kadang melakukan tugasnya di 3 desa? Bagaimana kebijakan dari BPPSDM untuk menjadikan penyuluh garda terdepan dalam mendampingi petani memberikan bimbingan dan penyuluhan?
3. Dirjen Tanaman Pangan memiliki Target tanam MT-II dengan luas lahan 5,16 juta ha dan ketersediaan benih untuk asepa 258 ribu ton (117% diatas kebutuhan). Berapa target produksinya dan berapa pupuk subsidi yang disediakan sehingga tidak ada lagi alasan pupuk langka?
4. Terkait dengan proses pendataan terhadap petani yang telah berkelompok (baik penggarap maupun pemilik) sampai saat ini masih terus berproses. Dimana BPPSDM menyebutkan penyuluh pertanian melakukan pendataan melalui pendekatan kelompok yang menjadi wilayah binaannya serta dimasukkan ke dalam Aplikasi SIMLUHTAN. Berdasarkan hal tersebut, kira-kira kapan

target proses pendataan tersebut berakhir? Karena semakin lama pendataan dapat menghambat penyaluran pupuk bersubsidi.

5. Apakah dengan adanya aplikasi SIMLUHTAN dapat mengefisiensi pendataan petani? Mohon penjelasan terkait aplikasi tersebut.
6. Apakah terdapat hambatan atau permasalahan dalam menjalankan proses pendataan petani? Mohon disebutkan terkait hambatan yang terjadi. Serta, tindakan apa yang akan dilakukan oleh BPPSDM dalam menghadapi hambatan yang terjadi selama proses pendataan?
7. Beberapa persoalan dan hambatan yang muncul dalam distribusi pupuk subsidi ini, diantaranya;
 - Selisih harga pupuk subsidi dan nonsubsidi hingga Rp. 3.000 per kilogram, menjadi peluang penyeleweng pupuk bersubsidi mendapat untung besar dengan jarak harga tersebut.
 - Catatan Bank Dunia dalam laporan ihwal belanja pemerintah Indonesia menyatakan 60 persen subsidi pupuk dinikmati oleh 40 persen petani kaya dan 30 persen subsidi pupuk dinikmati oleh produsen diluar sasaran target penerima subsidi, seperti perkebunan kelapa sawit (*Data laporan Bank Dunia bulan Juni 2020*).
 - Adanya petani yang membayar diatas harga tertinggi yang diterapkan pemerintah, terkadang adanya kolusi diantara para distributor.
8. Kendala Implementasi Program Kartu Tani :
 - Lemahnya jaringan internet di pelosok. Padahal, sebelum bisa mendapatkan kartu ini, petani harus terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI). Selain itu, pada saat akan membeli pupuk bersubsidi, petani harus membawa Kartu Tani datang ke agen atau pengecer yang telah

ditunjuk pemerintah untuk menggesek kartu ini pada mesin EDC di kios untuk membayar pupuk bersubsidi. Jika jaringan internet lemah, bagaimana transaksi ini bisa dilakukan? Pulau Jawa menjadi Pilot Project pengimplementasian program ini, apakah jaringan internet sudah menjangkau hingga ke pelosoknya?

- Perbedaan sistem aplikasi data bank dan data dukcapil daerah serta pusat yang tidak sinkron.
- Lambatnya penerbitan Surat Keputusan (SK) alokasi pupuk bersubsidi 2021 di level pemerintah daerah (Pemda), terutama di tingkat kabupaten/kota. Hingga 15 Januari 2021, ada 217 kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK. Wilayah mana saja yang dimaksud? Kami meminta data kabupaten/kota yang sudah memiliki SK hingga per tanggal 31 Maret 2021.

9. Berdasarkan data Himbara , baru segelintir petani yang menggunakan kartu tani. Selama tahun 2020 Himbara mencetak 12,46 juta Kartu Tani. Namun, yang sudah dibagikan baru 59% atau 7,28 juta, dan penggunaannya baru mencapai 25% atau 1,84 juta kartu. Salah satu alasannya adalah karena masih banyak petani yang hanya menyewa lahan, bukan sebagai pemilik. Sedangkan Kartu Tani peruntukannya hanya bagi pemilik lahan. Apa solusi konkret terkait hal ini? Mohon data yang valid terkait berapa petani yang memiliki lahan garapan dan berapa petani yang hanya penggarap (sewa lahan).

10. Minimnya bimbingan Pemda/Dinas pertanian terhadap petani dalam pengimplementasian Kartu Tani menyebabkan petani kesulitan menggunakannya. Berapa anggaran yang dialokasikan setiap tahun untuk kegiatan bimbingan ini hingga Maret 2021?

11. Fraksi Gerindra mengusulkan agar subsidi *input* digantikan dengan subsidi *output*. Pemerintah menjamin penyerapan produk

pertanian dengan harga layak. Subsidi output (harga) akan memberikan harapan tinggi kepada petani untuk meningkatkan produktivitasnya karena ada jaminan harga yang layak dan masalah harga ini sangat krusial dan penting. Bagaimana tindaklanjut koordinasi dengan stakeholder terkait? Siapa saja pihak-pihak tersebut berikan penjelasannya.

Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI serta Deputi II Kemenko Perekonomian RI, Eselon 1 Kementerian Pertanian RI, Dirut Pupuk Indonesia dan Ketum HIMBARA yang berbahagia.

Demikian masukan dan pertanyaan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 5 April 2021

KOMISI IV FRAKSI PARTAI GERINDRA DPR RI

G. Budisatrio Djiwandono	- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Ir. KRTH. Darori Wonodipuro, M.M., IPU	- Kapoksi
Ir. H. TA Khalid, M.M.	- Anggota
Renny Astuti, S.H., S.PN.	- Anggota
Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.	- Anggota
Ir. Endro Hermono, M.B.A.	- Anggota
Dr. Ir. Hj. Endang S Thohari M.Sc.	- Anggota